

ABSTRAK

Ardi Hajuan (2025), Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara. Dengan Komisi Pembimbing **Syawal Abdulajid** dan **Amriyanto**.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, penelitian dengan cara menganalisa ketentuan perundang-undangan kemudian menyesuaikan/ membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara belum berjalan efektif karena jumlah kasus sebagian besar belum dapat diselesaikan. Kemudian penyelesaian kasus korupsi tersebut juga memakan waktu lama tidak sesuai dengan target sebagaimana yang diatur dalam peraturan kapolri. Minimnya penyelamatan kerugian keuangan Negara oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yakni faktor substansi hukum, menyangkut regulasi atau aturan jika aturan atau norma itu lengkap, tegas dan jelas namun tidak didukung oleh penegak hukum yang profesional dan berintegritas maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. Kemudian faktor struktur hukum yang dimana di struktur/ lembaga yakni didalamnya terdapat faktor sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dari kuantitas Kepolisian Daerah Maluku Utara khususnya di Subdit III Tipikor masih kekurangan personil/ anggota penyidik sementara dilihat dari segi kualitas karena terdapat beberapa penyidik yang masih lulusan SMA sederajat, sebagian besar penyidik belum mengikuti pendidikan dan pengembangan spesialis (Ditbang). Selanjutnya faktor kultur hukum/ budaya hukum dimana faktor ini sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, dimana faktor kultur atau budaya hukum mengacu pada sikap, perilaku dan persepsi masyarakat serta aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum Kepolisian Daerah Maluku Utara adalah membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah serta instansi penegak hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, koordinasi antara aparat penegak hukum serta membangun kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian Daerah Maluku Utara.